

Palangka Raya, 6 Oktober 2022

Hal : Penyampaian Lembar Temuan Kepada
Sementara Hasil Pemeriksaan Reguler Yth. Kepala Biro Perekonomian
Pemerintahan Daerah
di -
PALANGKA RAYA

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Sekretaris Daerah a.n. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 700/408/SPT/SEKRE-2/INSP, tanggal 07 Oktober 2022, kami telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi aspek;

1. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
2. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi.
3. Aspek Sarana dan Prasarana.
4. Aspek Pengelolaan Keuangan.

Dari hasil pengawasan dimaksud ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat tanggapan/penjelasan lebih lanjut dari pihak objek yang diperiksa sehubungan dengan temuan tersebut.

Tanggapan/penjelasan tersebut kiranya dapat kami terima kembali paling lambat setelah hasil temuan sementara pengawasan ini diterima, sebagai dasar Tim merumuskan rekomendasi final untuk bahan mengambil langkah-langkah tindak lanjutnya.

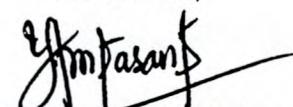
Apabila sampai batas waktu tersebut tanggapan/penjelasan dimaksud tidak dapat diberikan kepada Tim, maka temuan tersebut dianggap telah disetujui, untuk di tindak lanjuti.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PENGENDALI TEKNIS,


Drs. ERWIN PANARUNG
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP 19630916 198903 1 011

KETUA TIM,


YULIANI T.T ASANG, ST
Penata Tk. I (III/d)
NIP 19760415 200604 2 022

Tanda Terima :

Nama / NIP :

Tanggal :

Tandatangan :

**TEMUAN SEMENTARA
PEMERIKSAAN REGULER PERANGKAT DAERAH
PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
T.A 2022**

1. ASPEK TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1) Terdapat Pegawai yang belum memperbaharui Kartu Permintaan Penambahan Pembayaran Penghasilan (KP.4). (2.03.05)

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada administrasi Pengelolaan Kelengkapan Kepegawaian pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat Pegawai yang belum memperbaharui Kartu Permintaan Penambahan Pembayaran Penghasilan (KP.4) untuk Tahun 2022, yaitu :

No	Nama / NIP		Keterangan
1.	RUSWATI, SP NIP. 19650120 200701 2 007	4 Januari 2022 (Tanggal Pembuatan KP.4)	Pada Dokumen KP4 terdapat Tanggungan Anak a.n Diru Bambang Rusdianto Tanggal Lahir 15 Juni 1996 /26 tahun
2	HEPILIYA NIP. 119650523198703 2 014	Januari 2022 (Tanggal Pembuatan KP.4)	Pada Dokumen KP4 terdapat Tanggungan Anak a.n Nova Ferensia Tanggal Lahir 18 November 1998 /24 tahun
3	SILET NIP. 19650523198703 2 014	20 Desember 2021 (Tanggal Pembuatan KP.4)	Pada Dokumen KP4 terdapat Tanggungan Anak a.n Samuel Andika Candra Tanggal Lahir 26 Juni 1995 /27 tahun dan Pekerjaan Swasta
4	DIRJU NIP. 19650120200701 1 011	Januari 2022 (Tanggal Pembuatan KP.4)	Pada Dokumen KP4 terdapat Tanggungan Anak a.n Tia Arwani Pekerjaan Wiraswasta

Seharusnya tanggungan dalam daftar gaji PNS, maksimal jumlah tanggungan adalah untuk tunjangan 1 (satu) istri dan 2 (dua) anak atau maksimal 3 (tiga), apabila masih menanggung anak yang berusia sampai dengan 25 tahun atau belum bekerja harus melampirkan surat keterangan masih sekolah atau kuliah.

Dan di dalam Pengisian KP4 sebaiknya hanya memasukan data yang bertanggung saja.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

1. Pasal 31 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002

- Ayat (1)** Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak.
- Ayat (2)** Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut.
- Ayat (3)** Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).

SURAT KETERANGAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap (dengan gelar) : RUSWATI, SP
2. Nomor Induk Pegawai : 19650120 200701 2 007
3. Tempat Tgl lahir : Murutuwu, 20 Januari 1965
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Katolik
6. Status Kepegawaian : PNS
7. Jabatan Struktural/Fungsional Umum : Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi
8. Pangkat/Golongan : Penata / III.c
9. Unit Kerja : Biro Perekonomian
10. Instansi : Setda Provinsi Kalimantan Tengah
11. Masa Kerja Golongan : 28 Tahun 01 Bulan
12. Alamat/tempat tinggal : Jalan G.Obos IX, Jalan Jintan No - Kelurahan Menteng
Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya
13. Nomor Telp. Rumah / HP : 081349119786
14. Nomor NPWP : 79.539.409.7-711.000
15. Nomor Induk Kependudukan : 6271036001650004
16. Nomor Kartu Pegawai : N 271448

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- f. Disamping jabatan utama tersebut, bekerja pola sebagai :
- g. Penghasilan setiap bulan sebesar Rp.
- h. Mempunyai pesiun / pensiun Janda / Duda tiap bulan sebesar Rp.
- i. Mempunyai susunan keluarga sbb:

No.	Nama istri/suami/anak tanggungan	Tanggal		Pekerjaan/ Sekolah	Keterangan (AK,AT,AA)	Tertunjang/ Tidak tertunjang
		Kelahiran	Perkawinan			
1.	Diarto	17.01.1960	24.10.1995	Wiraswasta	Suami	Tertunjang
2.	Diru Bambang Rusdianto	15.06.1996	-	Bekerja	AK	Tidak Tertunjang
3.	Adji Dwiprasetyo	27.06.2001	-	Mahasiswa	AK	Tertunjang
4.	Diyah Utami Triayuningrum	21.12.2008	-	Pelajar	AK	Tertunjang

- j. Jumlah anak seluruhnya: 3 (Tiga) orang (yang menjadi tanggungan termasuk yang tidak masuk dalam daftar gaji)

Keterangan ini saya buat sesungguhnya dan apabila keterangan ini ternyata tidak benar (palsu) saya bersedia dituntut di muka pengadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dan bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya



Palangka Raya, 19 Oktober 2022
Yang menerangkan,

Ruswati
RUSWATI, SP
NIP 19650120 200701 2 007

- Catatan :
- AK = Anak Kandung
 - AT = Anak Tiri
 - AA = Anak Angkat
 - *) = Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN
UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

46. Nama lengkap : SILET
47. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 19680505 199308 2 001
48. Tempat / Tgl. Lahir : Hurung Tampang , 05 Mei 1968
49. Jenis Kelamin : Perempuan
50. Agama : Kristen Protestan
51. Status Kepegawaian : CPNS / PNS *)
52. Jabatan Struktural / Fungsional : Fungsional Umum
53. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
54. Pada Instansi / Departemen : Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah
55. Masa Kerja golongan : 21 Tahun 10 Bulan
56. Alamat / Tempat Tinggal : Jln. Tilung XIII No 19 Palangka Raya
57. Nomor Telp. Rumah / HP : 08125141233
58. N P W P : 77.725.191.9-711.001
59. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6271034505680012
60. Nomor Kartu Pegawai : G. 180927

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- p. Disamping jabatan utama tersebut, bekerja pula sebagai :
- q. Penghasilan setiap bulan sebesar Rp.
- r. Mempunyai Pensiun / pensiun Janda Duda tiap bulan sebesar Rp.
- s. Mempunyai susunan keluarga sebagai berikut :

No	Isteri/Suami/Anak Tanggung	Tanggal		Pekerjaan/ Sekolah	Keterangan (AK,AT,AA)	Tertunjang/ tdk tertunjang
		Kelahiran	Perkawinan			
1.	YUSAK	11 JUNI 1968 (53)	04 JULI 1994	PNS	Suami syah	Tdk tertunjang
2.	SAMUEL ANDIKA CANDRA	26 JUNI 1995	-	Swasta	ANAK KANDUNG	Tdk tertunjang

t. Jumlah anak seluruhnya : (yang tidak masuk dalam daftar gaji)

Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila ternyata terbukti ada keterangan yang salah (palsu) saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak saya.

Mengatakan
KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Palangka Raya, 19 Oktober 2022
Yang Menerangkan,


SAID SALIM, S.Kom
Pembina
NIP. 197207041993031004


SILET
Penata Muda Tk.I
NIP. 19680505 199308 2 001

CATATAN :

- AK = Anak Kandung
AT = Anak Tiri
AA = Anak Angkat
*) = coret yang tidak perlu

UNTUK MENDAPATKAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KELUARGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

31. Nama lengkap (dengan gelar) : DIRJU
32. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 196501202007011011
33. Tempat / Tgl Lahir : Dadahup, 20 Januari 1965
34. Jenis Kelamin : Pria
35. Agama : Kristen Protestan
36. Status Kepegawaian : ASN
37. Jabatan Struktural /
Fungsional Umum : Pengadministrasian Data Penyajian & Publikasi
38. Pangkat / Golongan : Pengatur TK I (II//d)
39. Pada Instansi : Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah.
40. Masa Kerja Golongan : 28 Tahun 06 Bulan
41. Alamat / Tempat Tinggal : JL.G.Obos XIII Gg Gadur Batu NO.06 Palangka Raya
42. Nomor Telp. Rumah / HP : 085216158029
43. Nomor NPWP : 77.726.276.7-711.100
44. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6271032001650004
45. Nomor Kartu Pegawai : N. 271392

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa saya :

- Disamping Jabatan utama tersebut, bekerja pula sebagai:.....
- Penghasilan setiap bulan sebesar Rp
- Mempunyai Pensiun / pensiun janda / Duda tiap bulan sebesar Rp.
- Mempunyai susunan keluarga sbb :

No	Nama Istri / Suami / anak Tanggung	Tanggal		Pekerjaan / Sekolah	Keterangan (AK, AT, AA)
		Kelahiran	Perkawinan		
1.	YOLANDA	19-09-2005	-	Siswa	AK

- Jumlah anak seluruhnya : orang anak (termasuk yang tidak masuk dalam daftar gaji)

Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila ternyata terbukti ada keterangan yang salah (palsu) saya bersedia dituntut di muka pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bersedia mengembalikan semua penghasilan yang telah saya terima yang seharusnya bukan menjadi hak



Mengesahkan
Kedua Biro Perekonomian
SAID SALIM, S.Kom
NIP.197207041993031004
Catatan

AK : anak kandung
AT : anak tiri
AA : anak angkat

Palangka Raya, 19 Oktober 2022
Yang menerangkan,


DIRJU
NIP. 196501202007011011

2. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan.

Peserta PPU badan usaha meliputi istri/suami yang sah dan maksimal 3 (tiga) orang anak dengan kriteria:

- a. Tidak atau belumpernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri
- b. belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan yang masih melanjutkan kuliah

hal ini disebabkan kepala sub Bagian Tata usaha tidak memantausecara berkala perubahan setatus keluarga pegawai pada biro perekonomian setda Kalimantan tengah. akibatnya surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga tidak informatif dan valid

Tanggapan Pejabat yang berkompeten:

Terimakasih atas koreksinya selanjutnya akan kami perbaiki dan kami monitor secara berkala agar kedepan lebih informatif dan valid sebagai data selanjutnya.

Direkomendasikan kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara tertulis agar:

- a. Memerintahkan kepala tata usaha untuk memantau secara berkala perubahan status susunan keluarga dengan meminta setiap pns aktif memperbaharui KP4. (04)
- b. membuat instruksi tertulis diinternal kantor yang memerintahkan seluruh pegawai agar segera melaporkan perubahan status susunan keluarga dan memperbaharui KP4. Sebagai bahan/dasar perhitungan tunjangan istri dan anak setiap bulan. (09)

2. ASPEK SARANA DAN PRASARA IA

1) Pembayaran Pajak terhadap aset kendaraan roda 2 (dua) tidak dlanggarkan di dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). (2.01.02)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen pengurus barang pada Biro Perekonomian dapat diketahui bahwa terdapat 7 unit kendaraan Roda 2 yang di manfaatkan oleh Biro Perekonomian yang tercantum dalam RKBMD dan KIB B, di dalam RKBMD untuk pemeliharaan tidak ada usulan pembayaran Pajak Kendaraan roda 2 (dua).

Seharusnya barang Milik Daerah harus diamankan dan dalam perhitungan RKBMD baik dalam penggantian suku cadang, servis, BBM dan oli serta pajak kendaraannya. Dalam hal ini pengamanan kendaraan dinas roda 4 (empat) atau 2 (dua) termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kondisi ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 308 pasal 2 huruf (a) Pengamanan hukum Kendaraan Dinas dilakukan, antara lain: a. melakukan pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK, termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Hal ini disebabkan penyusunan perencanaan tidak mempedomani aturan yang berlaku.

Akibatnya pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti BPKB dan STNK termasuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak bisa dilaksanakan dan di bebaskan kepada PNS yang ditunjuk menggunakan aset tersebut.

Tanggapan Pejabat yang berkompeten;

Terimakasih atas saran dan masukannya, akan kami anggarkan pembayaran pajak kendaraan roda 2 (dua)

Direkomendasikan Kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar merencanakan dan menganggarkan pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB) roda 2 (dua) yang menjadi aset di dalam Kartu inventaris Barang (KIB) B. (06)

2). Terdapat bukti pembayaran sebesar Rp1.750.000,00 yang tidak diperkenankan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bendaharawan Pengeluaran Pembantu pada Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat bukti pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1.750.000,00 yang tidak diperkenankan yaitu :

- SPT nomor 137/DPA-2022/1/EK tanggal 18 Agustus 2022, An. Damis dan kawan-kawan sebanyak 10 orang, Pelaksanaan pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam rangka Mengikuti Bakti Sosial Peringatan HUT ke - 77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Palangka Raya

Kondisi ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Belanja Negara pasal 13 ayat (1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan:

- a. perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemen/lembaga/pemerintah daerah;
- b. Pemberian ucapan selamat, hadiahManda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa;
- c. Pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olah raga pada departemen/lembaga/pemerintah daerah
- d. Pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut diatas.

Hal ini disebabkan kelalaian Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak mentaati ketentuan yang bertaku.

Akibatnya terdapat pengeluaran anggaran yang tidak diperkenankan senilai Rp1.750.000,00

Tanggapan Pejabat yang berkompeten :

Kedepan akan menjadi perhatian kami terkait pembuatan/penerbitan SPT dan SPPD sesuai peraturan yang berlaku

Direkomendasikan Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Memerintahkan secara kepada pelaksana perjalanan dinas untuk bertanggung Jawabkan uang senilai 1.750 000, 00 sesuai proporsi masing-masing untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah bukti disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)

2) Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha belum melaksanakan Tupoksinya terkait Pembinaan Terhadap Badan Usaha Milik Daerah. (2.03.02)

Berdasarkan hasil uji petik dokumen pada Bagian BUMD dan BLUD, terutama yang membidangi Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha. Sesuai tugas pokok dan fungsinya antara lain menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha; menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur bidang Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha.

Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha belum sepenuhnya melaksanakan dan menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah bidang jasa keuangan dan aneka usaha. Dalam hal ini terdapat pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris, Direksi dari PT. Bank Kalteng dan PT. Jamkrida Kalteng, masih belum sesuai dengan aturan yang berlaku (tidak melalui Pansel) atau Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan atau paling sedikit melalui tahapan seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan serta wawancara akhir.

Seharusnya pengangkatan dan pemberhentian Komisaris Utama, Komisaris, Direksi dari PT. Bank Kalteng dan PT. Jamkrida Kalteng mengikuti proses penjurangan yang telah ditentukan dan terdokumentasi. Sebagai Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD, Biro Perekonomian melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah, melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dan melakukan tahapan lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan semua tahapan terdokumentasikan.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 4 ayat 1 Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
 - Pasal 5 ayat 1 Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang masa jabatannya berakhir.
 - Pasal 5 Ayat 4 Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Kepala Daerah.
 - Pasal 18 ayat (1) Berdasarkan laporan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4), Kepala Daerah melakukan seleksi dari unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah.
 - Pasal 33 ayat (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
 - Pasal 34 Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- b. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Bab II Pasal 3 Ayat 1 huruf c Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahkan Biro Perekonomian.

Hal ini disebabkan Bagian BUMD dan BLUD Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah belum mempedomani aturan yang berlaku dalam melaksanakan tupoksinya.

Akibatnya pengangkatan Komisaris Utama, Komisaris, Direksi dari PT. Bank Kalteng dan PT, Jamkrida Kalteng belum sesuai proses penjarangan,

Tanggapan Pejabat yang berkompeten

Terimakasih telah diingatkan kami akan perbaiki sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku guna perbaikan kedepan

Direkomendasikan Kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Kalimantan Tengah secara tertulis memerintahkan Kepala Bagian BUMD dan BLUD dan Kepala Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah secara tertulis agar :

- 1) Memerintahkan untuk kedepannya melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. (09)
- 2) Menyurati BUMD yang melaksanakan Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang tanpa melalui penjarangan untuk melengkapi dokumen administrasi terkait **pengangkatan sebagai** dewan Komisaris dan dewan direksi. (06)

3). **Kelebihan Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan Teknis (PPTK) dan Pembayaran Honorarium yang tidak diperbolehkan senilai Rp14.600.000,00 (1.01.07)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada dokumen surat pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022, ditemukan adanya kelebihan pembayaran honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf pengelola Keuangan yang tidak diperbolehkan senilai Rp14.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Yang Dibayarkan	Seharusnya Rp.	Selisit
1.	Arifda Firdaus Anggaran yang dikelola Adanya Perubahan SK PPTK Nomor 98/TU.I-2022/EK tanggal 25 Februari 2022 Rp616.348.250	PPTK U.B Januari s.d Februari	2 x 1.910.000 = 3.820.000	2 x 1.910.000 = 3.820.000	
		U.B Maret 2022	1 x 1.910.000= 1.910.000	1 x 1.610.000= 1.610.000	300.000
		U.B April 2022	1 x 1.910.000= 1.910.000	1 x 1.610.000= 1.610.000	300.000
2.	Dr. Bains, S.P., M.AP Anggaran yang dikelola Rp1.428.633.250	PPTK U.B Maret	1 x 1.910.000 = 1.910.000	3 x 1.910.000 = 5.730.000	
		U.B April s.d Juni 2022	3 x 1.910.000 = 5.730.000	3 x 1.910.000 = 5.730.000	
		U.B Juli s.d Agustus 2022	2 x 1.910.000 = 3.820.000	2 x 1.910.000 = 3.820.000	
3.	Ir. Evangelis, M.Si Anggaran yang dikelola Rp439.138.500,00	PPTK U.B Maret	1 x 1.910.000 = 1.910.000	1 x 1.410.000= 1.410.000	500.000
		U.B April s.d Juni 2022	3 x 1.910.000 = 5.730.000	3 x 1.410.000 = 4.230.000	1.500.000
		U.B Juli s.d Agustus 2022	2 x 1.910.000 = 3.820.000	2 x 1.410.000 = 2.820.000	1.000.000
4.	H. Rommy Valentino Koetin, ST.,MA Anggaran yang dikelola Rp716.348.250	PPTK U.B Mei s.d Juni	2 x 1.910.000= 3.820.000	2 x 1.610.000= 3.220.000	600.000
		U.B Juli s.d September	3 x 1.910.000 = 5.730.000	3 x 1.610.000= 4.830.000	900.000
5.	Fanny Kartika O, S.Psi.,M.Sc Anggaran yang dikelola Rp1.881.811.250	PPTK U.B September	1 x 1.910.000 = 1.910.000	3 x 1.910.000 = 5.730.000,	
6.	Didik Nurhadi, S.Si.,M.P.H Anggaran yang dikelola Rp439.138.500,00	PPTK Ub. September	1 x 1.910.000 = 1.910.000	1 x 1.410.000= 1.410.000	500.000
7.	Norbayah, A.Md NIP.	Staf Pengelola Keuangan U.B Januari s.d September	9 x 500.000= Rp.4.500.000	-	4.5000.00
8.	Dewi Ratna Sari, A.Md	Staf Pengelola Keuangan U.B Januari s.d September	9 x 500.000= Rp.4.500.000	-	4.5000.00
JUMLAH					14.600.000

Seharusnya honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola masing-masing. Sedangkan jabatan staf Pengelola Keuangan di dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dalam Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan tidak diatur.

Kondisi ini tidak sesuai dengan :

- Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada
 - 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Satuan Biaya Honorarium

1.1.2	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d Rp500 Jt	OB	Rp1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OB	Rp1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OB	Rp1.910.000

Hal ini disebabkan penganggaran honorarium tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Akibatnya terjadi pemborosan yang merugikan keuangan daerah senilai **Rp14.600.000,00**

Tanggapan Pejabat yang berkompeten :

Terimakasih atas koreksinya, untuk bulan selanjutnya dan pada penganggaran tahun 2023, akan kami sesuaikan honor PPTK sesuai dengan batasan pagu yang diinput oleh pptk dan mengacu pada perpres No 30 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dan akan kami perhatikan kedepannya agar hal ini tidak terjadi dikemudian hari

Direkomendasikan kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah agar memerintahkan secara tertulis masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf Pengelola Keuangan untuk bertanggung jawabkan kelebihan pembayaran honorarium senilai Rp14.600.000,00 dengan membebaskan kepada masing-masing penerima honor.

Bukti setoran disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah up. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah. (01)

4). Terdapat beberapa pengeluaran yang belum didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah senilai Rp56.487.700,00. (1.02.05)

Hasil penelusuran secara uji petik pada bukti SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat bukti pembayaran belanja yang tidak diyakini kebenarannya senilai Rp56.487.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No BKU	Nama Kegiatan	Senilai (Rp)	PPTK	Keterangan
1.	206/BKU/EK/IX/2022	Belanja Pembelian Alat Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas-Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ub. September 2022 an. Toko Adelia	4.175.000	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
2.	207BKU/EK/IX/2022	Belanja Pembelian Alat bahan untuk kegiatan Kantor ATK Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ub. Juli 2022. An. Toko Adelia	7.771.600	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama.
3.	204/BKU/EK/IX/2022	Biaya Pembelian Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK Penyediaan Bahan Logistik Kantor UB. Agustus 2022 An. Toko Adelia	7.068.400	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
4.	205/BKU/EK/IX/2022	Biaya Pembelian Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-AK-Penyediaan Bahan Logistik Kantor Ub. September 2022 An. Toko Adelia	5.680.200	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
5.	92/BKU/EK/IX/2022	Biaya Pembelian Makanan Minuman Rapat sebanyak 25 Kotak snack pada tanggal senin, 22 Agustus 2022 An. Toko Rahayu	375.000	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
6.	193/BKU/EK/IX/2022	Biaya Pembelian Makanan Minuman Rapat sebanyak 25 Kotak snack pada tanggal senin, 29 Agustus 2022 An. Toko Rahayu	375.000	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
7.	194/BKU/EK/IX/2022	Biaya Pembelian Makanan Minuman Rapat sebanyak 10 Kotak snack pada tanggal Jumat, 02 September 2022 An. Toko Rahayu	150.000	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama.
8.	195/BKU/EK/IX/2022	Biaya Pembelian Makanan Minuman rapat sebanyak 25 kotak snack pada tanggal Senin, 5 September 2022, An. Toko Rahayu	375.000	Fanny Kartika.O, S.Pi.,M.Sc	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
9.	093/BKU/EK/VI/2022	Biaya Pembelian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK. An. Toko Adelia	9.136.000	Dr. Bainsi, S.P.,M.AP	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko.

					Tulisan : Cenderung Sama
10.	092/BKU/EK/VI/2022	Biaya Pembelian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK An. Toko Adelia	5.776.500	Dr. Baina, S.P.,M.AP	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
11.	094/BKU/EK/VI/2022	Biaya pembelian Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Kertas An. Toko Adelia	4.355.000	Dr. Baina, S.P.,M.AP	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
12.	103/BKU/EK/VI/2022	Pembayaran Biaya pembelian Alat Tulis Kantor keg. Koodinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelatan dan Perikanan. Fc. Adelia	1.000.000	H. Rommy V. Koetin, S.T.,M.A	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
13.	103/BKU/EK/VI/2022	Pembayaran Biaya pembelian Alat Tulis Kantor - Kertas keg. Koodinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, kelatan dan Perikanan. An. Fc. Adelia	550.000	H. Rommy V. Koetin, S.T.,M.A	Nota toko tidak diberi tanggal pembelian dan nama dari Pihak Toko. Tulisan : Cenderung Sama
14.	BKU 003/BKU/EK/II/2022	Biaya pembelian suku cadang mobil dinas Avanza dengan Nomor polisi KH 1179 AU. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	9.700.000	Arifda Firdaus	Nota toko yang tidak diberi tanggal pembelian dan nama Pihak Toko.
JUMLAH			56.487.700		

Nota Toko tidak mencantumkan tanggal pembelian barang dan nama dari pihak toko, tulisan pada nota cenderung sama dengan nota lainnya. Sehingga pemeriksa berpendapat bahwa pembayaran belanja tidak diyakini kebenarannya.

Hasil konfirmasi dengan Penyimpan Barang an. **Nurbayah/NIP.19750424 200801 2 023** menyatakan setiap pembelian barang pakai habis hanya menerima surat pertanggungjawaban dari setiap PPTK Biro Perekonomian.

Seharusnya semua pembelian barang pakai habis, seperti ATK atau pun perabot kebersihan harus tercatat pada Berita Acara penerimaan dan pengeluaran pengelola pemanfaatan barang milik Daerah, jadi jika tidak tercatat pada laporan persediaan barang pakai habis ada potensi jika belanja tersebut tidak dilaksanakan, karena pengelola pemanfaatan barang milik Daerah tidak mengetahui adanya belanja yang dimaksud.

Kondisi ini tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 3 Ayat (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 141 ayat (1) : "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

- Pasal 318 ayat (2) Pengamanan administrasi barang persediaan dilakukan antara lain:
- a. buku persediaan;
 - b. kartu barang;
 - c. Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - d. berita acara pemeriksaan fisik barang;
 - e. Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB);
 - f. laporan persediaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang semesteran/tahunan;
 - g. dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.

Hal ini disebabkan PPTK yang bersangkutan tidak mempedomani ketentuan yang berlaku.

Akibatnya pengeluaran tersebut diragukan keabsahannya serta berpotensi terjadi pemborosan keuangan daerah senilai Rp56.487.700,00

Tanggapan Pejabat yang berkompeten:

Terima kasih atas koreksinya, kedepannya kami akan lebih teliti kembali terkait spj yang akan kami lampirkan,serta kami akan tidak lanjut dengan instruksi Kepala Biro agar setiap pembelian dan penerimaan barang habis pakai untuk melampirkan berita acara penyerahan barang (BAPB)

Direkomendasikan kepada Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara tertulis agar:

1. Memerintahkan PPTK yang melaksanakan kegiatan **agar** melampirkan bukti pengeluaran **secara** lengkap dan **sesuai** dengan belanja yang dibayarkan. (09)
2. Mempertanggung jawabkan potensi kerugian daerah senilai Rp56.487.700,00 dengan membebaskan kepada masing-masing PPTK, selanjutnya untuk menyetor ke Kas Daerah. (01)
Bukti pelaksanaan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.(01)